



TINGGAL MENUNGGU SK PIMWAN DARI GUBERNUR KUA-PPAS dan RAPBD 2020 Siap Dikebut

YOGYA (KR) - Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB) 2020 sudah siap untuk dikebut pembahasannya oleh DPRD Kota Yogya. Hal ini seiring terbentuknya komposisi alat kelengkapan (alkap) dewan.

Hanya, penetapan komposisi alkap tersebut hanya bisa dilakukan oleh pimpinan dewan (pimwan) definitif. "Saat ini tinggal menunggu SK pimwan dari Gubernur. Begitu SK itu turun, esoknya akan langsung digelar sidang paripurna untuk melantik pimwan definitif. Begitu selesai dilantik, komposisi alkap akan langsung ditetapkan," tandas Ketua DPRD Kota Yogya Sementara Danang Rudyatmoko, Senin (23/9).

Diakuinya, pembahasan anggaran sudah bisa digulirkan ketika alkap dewan terbentuk. Terutama Badan Anggaran (Banggar) yang akan menjadi mitra Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Badan Musyawarah (Banmus) yang berhak mengagendakan agenda atau tahapan pembahasan. Khusus untuk Banggar dan Banmus, tidak sekadar komposisi keanggotaan melainkan pimpinannya juga harus sudah terbentuk.

Sedangkan alkap berupa komisi, tidak perlu menunggu terbentuknya pimpinan asalkan keanggotaannya sudah ditetapkan.

Pembahasan anggaran di komisi bersama mitra kerja pemerintah, dapat diampu oleh pimwan. "Posisi sekarang dengan sudah terbentuknya komposisi alkap, maka bisa melakukan berbagai pembahasan termasuk anggaran. Apalagi Banggar dan Banmus pimpinannya otomatis melekat pada pimwan. Semoga pimpinan komisi juga secepatnya terbentuk," urainya.

Terkait batas waktu pembahasan anggaran, menurut Danang, masih mencukupi. RAPBD harus sudah ditetapkan sebelum 30 November. Sehingga masih ada dua bulan efektif untuk membahas KUA-PPAS dan RAPBD. Namun demikian, Danang berharap pembahasannya tidak sekadar mengejar waktu melainkan kualitas karena berkaitan rencana pembangunan selama setahun ke depan.

Plt Sekretaris DPRD Kota Yogya Prima Hastawan, menuturkan pihaknya sudah siap menggelar sidang paripurna pelantikan pimwan definitif periode 2019-2024. Akan tetapi, hal itu juga harus berdasarkan SK dari Gubernur. Sehingga begitu pihaknya menerima SK tersebut, maka paripurna pelantikan bisa langsung digelar.

"Rencananya, setelah pelantikan akan dilanjutkan penetapan komposisi alkap kemudian penyampaian nota KUA-PPAS dari walikota. Jadi dalam satu hari itu bisa sekaligus," tandasnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005